**BAB II**

**TINJAWAN UMUM DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DAN FORUM G20**

1. **Diplomasi Indonesia**
2. **Sejarah Diplomasi Indonesia[[1]](#footnote-2)**

Sejarah diplomasi negara Indonesia sebenarnya telah berlangsung lama. Tonggak penting munculnya diplomasi di Indonesia berawal dari diikrarkanya perasaan satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air, yang merupakan dasar dari pembentukan identitas nasional oleh para pemuda-pemudi Indonesia melalui sumpah pemuda, yang diikrarkan dalam Konggres Pemuda II di Jakarta pada tanggal 28 oktober 1928.

Setelah munculnya peristiwa sumpah pemuda, yang merupakan tonggak terpenting dalam mempersatukan rasa nasionalisme bangsa Indonesia, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya, setelah sehari sebelumnya Soekarno dan Hatta berunding dengan para pemuda di Rengasdengklok mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, memanfaatkan momentum menyerahnya Jepang kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Dan pada tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan menteri – menteri yang memimpin kabinet, beserta kementrian yang menaunginya. Salah satu kementrian yang kelak akan berpengaruh di bidang diplomasi adalah Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, yang saat itu dipimpin oleh Ahmad Subardjo.

Meskipun Republik Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun Belanda belum mengakui secara sah berdirinya Republik Indonesia, dan mencoba kembali menguasai Indonesia dengan menggunakan bantuan Inggris. Karena hal tersebut, pada periode 1945 hingga 1949 di Indonesia muncul berbagai perlawanan fisik menentang agresi militer Belanda. Selain perlawanan fisik yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, dilakukan pula berbagai usaha diplomasi dan berbagai perundingan yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan atas berbagai wilayah di Indonesia dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang bertujuan menjaga kedamaian dan ketertiban dunia tidak tinggal diam dengan hal ini. Dewan Keamanan PBB mengirimkan misi perdamaian ke Indonesia, dan mengeluarkan resolusi agar Belanda dan Indonesia segera menghentikan segala aktivitas militer. PBB meminta agar Belanda membebaskan semua tahanan politik, pembentukan suatu pemerintahan sementara dan pengakuan kedaulatan atas Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diselenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, yang menjadi jalur pembuka munculnya pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia pada 27 Desember 1949.

Setelah resmi diakui kedaulatanya sebagai negara merdeka, Republik Indonesia mulai menyusun kembali pemerintahan yang selama kurang lebih empat tahun, dari tahun 1945 hingga 1949 berjuang mempertahankan kemerdekaan yang akan direbut kembali oleh Belanda. Dan pada bulan Januari 1950 Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melakukan kunjungan internasionalnya yang pertama sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu mengadakan kunjungan ke India, Pakistan, dan Birma.

Sebagai salah satu negara yang telah mendapatkan kedaulatan secara penuh, Indonesia bergabung ke dalam keanggotaan PBB pada tahun 1950. Tepatnya pada tanggal 27 September 1950, Majelis Umum PBB menerima Indonesia sebagai anggota PBB. Pada tahun 1955, Indonesia kembali menunjukan eksistensinya di dunia internasional dengan memprakarsai lahirnya Konferensi Asia Afrika (KAA), bersama Burma, India, Pakistan dan Sri Lanka. Selain sebagai pemrakarsa Indonesia juga berlaku sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang dilangsungkan di Bandung pada tanggal 18 sampai 25 April 1955.

Indonesia yang tidak ingin mengidentikan negaranya dengan blok barat maupun blok timur, turut serta sebagai salah satu negara penggagas Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Non-Blok (KTT Non-Blok). Dan pada tahun 1961 diselenggarakan KTT Non-Blok yang pertama di kota Beograd, Yugoslavia.KTT tersebut dihadiri oleh beberapa negara berkembang yang tidak turut serta menyertakan diri sebagai negara pendukung blok timur maupun blok barat.

Pada tahun 1961, Inggris mencoba menggabungkan wilayah koloninya di semenanjung Malaka, Singapura dan Kalimantan Utara menjadi satu dalam Federasi Malaysia. Rencana ini kemudian ditentang oleh Pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Federasi Malaysia merupakan Negara bentukan Inggris, dan hal ini memungkinkan bagi Inggris untuk melakukan kontrol atas Asia Tenggara khususnya Indonesia sebagai tetangga terdekat. Atas dasar tersebut Indonesia mengambil sikap tegas untuk mengadakan konfrontasi dengan Malaysia. Dan pada tanggal 3 Mei 1963, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang menjadi legitimasi munculnya penyerangan terhadap Malaysia yang dilakukan oleh militer Indonesia.

Ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia semakin ditegaskan oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Januari 1965, Presiden Soekarno mengumumkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB merupakan reaksi atas ditetapkanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB berakibat pada tersisolasinya Indonesia dari pergaulan masyarakat internasional.

Setelah menyatakan keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia tidak tinggal diam. Sikap tegas langsung diambil oleh Presiden Soekarno dengan membentuk kekuatan baru, yaitu The New Emerging Force (NEFO) sebagai representasi negara-negara dunia ketiga sebagai kekuatan baru untuk melawan kedigdayaan The Old Establsihed Force (OLDEFO) yang berisikan negara-negara maju.

Jika kita urutkan pada beberapa era sebelumnya, sikap tegas Presiden Soekarno melawan intervensi negara-negara barat telah banyak dilakukan. Pada kisaran tahun 1960 saat Belanda mencoba menguasai Irian Barat, Republik Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda. Hal yang sama terjadi pada tahun 1963 saat Inggris menyatakan kemerdekaan Federasi Malaysia, hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris berakhir. Dan yang terakhir adalah pada saat dilangsungkanya Asian Games 1962 di Jakarta. Indonesia sebagai tuan rumah menolak keikutsertaan Israel dan Taiwan dalam ajang tersebut. Hal ini menimbulkan kemarahan dari pihak Komite Olimpiade Internasional (IOC), yang mengakibatkan tidak direstuinya penyelenggaraan Asian Games 1962 oleh IOC. Setahun kemudian Presiden Soekarno membalas dengan menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan di IOC, dan membentuk olimpiade tandingan yang bernama GANEFO. Indonesia sendiri tercatat sebagai tuan rumah pertama sekaligus terakir kali dilangsungkanya GANEFO, yaitu di Jakarta pada tahun 1963.

Setelah munculnya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia sekitar tahun 1963 hingga 1964 yang memunculkan politik konfrontasi. Pada tanggal 11 Agustus 1965 disepakati normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia, dengan ditandatanganinya sebuah persetujuan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia oleh masing-masing Menteri Luar Negeri di Jakarta. Dan pada tanggal 28 September 1965 Indonesia melalaui Menteri Luar Negeri Adam Malik menyatakan untuk aktif kembali dalam keanggotaan PBB.

Dengan kembalinya Indonesia dalam keanggotaan PBB, berarti mengembalikan pula misi Indonesia untuk turut serta menjalin kerja sama antar negara dan turut serta dalam usaha mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.Hingga saat ini pun keterlibatan Indonesia dalam PBB masih terlihat. Selain aktif dalam mengirimkan Pasukan Perdamaian Garuda, Indonesia pun sering mendapatkan bantuan internasional dari PBB berkait dengan pendidikan, perekonomian, kebudayaan maupun bencana alam yang sering melanda Indonesia.

1. **Makna Diplomasi Bagi Indonesia**

Diplomasi secara teori yaitu praktek pelaksanaan hubungan antarnegara melalui perwakilan resmi. Diplomasi merupakan teknik operasionaluntuk mencapai kepentingan nasional di luar wilayah jurisdiksi sebuahnegara.[[2]](#footnote-3)

Di dalam sejarahnyaantara teori dan praktek diplomasi Indonesia tidak berdiri sendiri. DiplomasiIndonesia adalah cara pelaksanaan politik luar negeri dengan landasankonstitusionalnya pada Pembukaan UUD 1945.[[3]](#footnote-4)

Nasionalisme merupakan semangat dasar diplomasi Indonesia.Nasionalisme Indonesia sejak awal berakar dari perjuangan membebaskandiri dari penjajahan. Nasionalisme Indonesia mengandung unsur-unsurkebersamaan atau solidaritas dengan semua yang memperjuangkan danmelawan penjajahan di seluruh dunia.[[4]](#footnote-5)Nasionalisme Indonesia berorientasikuat pada solidaritas internasional yang sekaligus satu landasan ataupun tugaspokok politik luar negeri Indonesia yang dijalankan dengan praktekdiplomasi. Hal ini tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945,*“…. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …”.[[5]](#footnote-6)*Pembukaan UUD inilah yangmemberikan amanat kemana arah dan bentuk diplomasi Indonesia yang mestidijalankan oleh para diplomat yang diutus secara resmi oleh negara.

Diplomasi, banyak memiliki keterkaitan dengan politik luar negeri. Seperti halnya Bantoro (1991) yang mengatakan bahwa diplomasi merupakan bagian dari politik luar negeri.[[6]](#footnote-7) Pernyataan Bantoro tersebut didukung oleh Dinh (1987) yang menganalogikan diplomasi sebagai taktik, dan politik luar negeri sebagai strateginya.[[7]](#footnote-8) Intinya, politik luar negeri menggunakan diplomasi itu sendiri sebagai sebuah instrumen penting untuk dapat menggapai kepentingan nasional negara tersebut juga untuk menciptakan kebijakan-kebijakan internasional yang sesuai dengan keinginan negara tersebut. Karena itu, diplomasi merupakan hal yang sangat penting dalam berlangsungnya politik luar negeri.

Dalam beberapa bahan pustaka, diplomasi diterjemahkan sebagai suatu seni dalam melakukannegosiasi antar pihak (bisa dua atau lebih pihak) dalam mencapai kesepakatan tertentu berkaitandengan masalah tertentu. Misalnya saja diplomasi untuk mencapai perdamaian, diplomasi dalammencapai kesepakatan kerjasama (perdagangan, kebudayaan, politik, dan lain-lain). Alat seninegosiasi ini termasuk ancaman, pertukaran kepentingan, sanksi seperti misalnya embargo,aturan negara yang dibuat baik untuk mendukung atau melarang tindakan lintas negara, dan lainsebagainya.[[8]](#footnote-9)

Sebagaimana lazimnya dalam proses negosiasi, tentunya setiap pihak yang terlibat dalam prosesnegosiasi ini mempunyai “pegangan” yaitu yang berupa “keunggulan tertentu” yang dapatmenjadi modal *“bargaining position”* dan *“bargaining power”* untuk dapat menyeimbangkanposisi dalam proses negosiasi agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Agar supaya proses diplomasiini berhasil sesuai yang diharapkan, harus bisa dicapai “mutual trust” antar pihak yang terlibatdalam diplomasi yang bersangkutan.

Dalam proses diplomasi, di samping formal diplomasi, yaitu yang diketahui dan dilakukan secaraterbuka, juga dikenal informal diplomasi, yang biasanya merupakan pembicaraan antar pihakdalam suatu pertemuan tertentu yang belum tentu berkaitan dengan topic pertemuan yangbersangkutan.[[9]](#footnote-10)

1. **Diplomasi Ekonomi Indonesia**
2. **Sejarah Diplomasi Ekonomi Indonesia**

Diplomasi ekonomi Indonesia tercatat dalam sejarah, dimulai pada sekitar tahun 1700 Masehi antara suku Aborigin di kawasan Australia Utara dengan orang Makassar yang melakukan perdagangan teripang. Orang Makasar mengambil teripang dari kawasan Australia Utara kemudian memasaknya langsung di tempat, sehingga menjadi semacam industri pengolahan teripang. Tentunya proses ini tidak akan selesai dalam waktu singkat sehingga mereka membuat tempat tinggal semi permanen untuk tinggal dan mengolah teripang.[[10]](#footnote-11)

Kedatangan bangsa Makassar ini diperkirakan sekitar tahun 1780M. Pertanggalan ini diperoleh dari botol-botol *liquor* berbentuk persegi yang diperkirakan diproduksi pada abad ke-19, serta koin perunggu berlambang VOC yang bertuliskan tahun 1780.[[11]](#footnote-12)

Sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, diplomasi ekonomi telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional saat itu. Diplomasi ekonomi Indonesia yang dilakukan antara lain:[[12]](#footnote-13)

1. Diplomasi beras ke India, yaitu Indonesia menjual 500.000 ton beras dengan harga murah, sedangkan India mengirimkan obat – obatan dan bahan pakaian.
2. Mengadakan hubungan dagang langsung luar negeri dengan perusahaan swasta Amerika Serikat (*Isbrantsen Inc.*), Singapura dan Malaysia.

Pada jaman pemerintahanSoeharto, diplomasi ekonomi Indonesia dengan dasar hubungan sejarah, politik dan budayadengan Belanda menghasilkan *Intergovernmental Group on Indonesia*(IGGI) yaitu sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia.[[13]](#footnote-14)

Anggota IGGI adalah Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania Raya, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss dan Amerika Serikat.IGGI mengadakan pertemuan pertamanya pada 20 Februari 1967 di Amsterdam. Indonesia saat itu diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dari 1967 hingga 1974, IGGI mengadakan dua kali pertemuan setiap tahunnya, namun sejak 1975, pertemuan hanya diadakan sekali dalam setahun karena perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik. Bantuan awal IGGI adalah dalam penyusunan program rencana lima tahun Indonesia, Repelita I (1969-1973) dan pendanaan 60% darinya.[[14]](#footnote-15)

Pada Maret 1992, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa dana bantuan IGGI akan ditolak jika organisasi tersebut masih diketuai Belanda. IGGI kemudian digantikan *Consultative Group on Indonesia* (CGI).[[15]](#footnote-16)

Sejak berakhirnya perang dingin dansemakin menguatnya globalisasi ekonomi dunia,diplomasi ekonomi dengan tujuan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat telahmenjadi prioritas utama bagi banyak negara diberbagai belahan dunia. Walaupun isu politik dan keamanansempat kembali menjadi perhatian besar setelahterjadinya serangan teroris 11 September 2001,namun diplomasi ekonomi kembali menjadi isuutama global setelah terjadinya krisis ekonomidan keuangan dunia terutama di AS dan EropaBarat pada tahun 2008, diikuti dengan resesiekonomi yang berkelanjutan dan hingga saat inimasih belum pulih sepenuhnya.[[16]](#footnote-17)

1. **Pengertian Diplomasi Ekonomi**

Diplomasi ekonomi adalah salah satu bentuk diplomasi yang mempergunakan instrument ekonomi guna mencapai tujuan dan kepentingan negara (atau lembaga lain seperti korporasi) tertentu. Secara umum, diplomasi ini diterjemahkan sebagai proses pengajuan kebijakan dan keputusan serta berbagai konsultasi tentang kemudahan dan prospek ekonomi guna mencapai tujuan dan kepentingan nasional, untuk dinegosisasikan agar dapat disepakati oleh negara lain, baik secara bilateral maupun multirateral. Diplomasi ekonomi biasa merujuk kepada kepentingan untuk masalah perdagangan (*export/import*), investasi, pinjaman, pelaksanaan proyek pembangunan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.[[17]](#footnote-18)

Secara luas, Rana mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai suatu proses, melalui proses dimanasuatu negara menyelesaikan masalahnya dengan negara lain, guna memaximalkan pendapatan dan perolehan negara melalui kegiatan ekonomi dan pertukaran ekonomi, baik secara bilateral, regional maupun multilateral.[[18]](#footnote-19)

Dengan melihat kepada pemahaman di atas, maka diplomasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses seni yang dinamik yang dalam proses pelaksanaannya selalu bervariasi sesuai dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut, guna memaksimalkan pencapaian suatu tujuan atau kepentingan dalam membangun dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Sejak pendirian *World Trade Organization* (WTO) tahun 1995, peran diplomasi ekonomi menjadi semakin *“crucial”* bagi negara-negara yang sedang berkembang untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pembangunan ekonomi.[[19]](#footnote-20)

Diplomasi ekonomi bukanlah sebuah praktek diplomasi terpisah dari diplomasi umum. Diplomasi ekonomi memiliki asumsi dan menjalankan strategi yang sama dengan praktek diplomasi pada umumnya. Namun, ada beberapa hal yang membedakan diplomasi ekonomi dan menyebabkan diplomasi ekonomi terpisah menjadi kajian tersendiri.

Salah satu karakter utama dari diplomasi ekonomi adalah bahwa diplomasi ekonomi sangat sensitif dan reaktif terhadap perubahan dan perkembangan pasar.[[20]](#footnote-21) Karenanya pada beberapa kasus, diplomasi ekonomi dapat gagal jika pasar menawarkan alternatif lain yang lebih menarik[[21]](#footnote-22) atau dengan kata lain, praktek diplomasi ini adalah jenis diplomasi yang berhadapan langsung dengan satu kekuatan lain yakni kekuatan pasar (*market forces*). Selain itu, hal yang membedakan diplomasi ekonomi dari diplomasi lain adalah adanya peran yang cukup besar dari sektor *privat* dalam proses negosiasi dan formulasi kebijakannya.[[22]](#footnote-23)

Rashid mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai proses formulasi dan negosiasi kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, pertukaran barang, jasa, tenaga kerja dan investasi dinegara lain.[[23]](#footnote-24) Odell menawarkan definisi yang lebih luas dengan memasukkan elemen lain yakni adanya kebijakan terkait pertukaran uang dan informasi termasuk bantuan luar negeri atau *official development assistance*.[[24]](#footnote-25)

Menurut Pavol Baranay seorang diplomat ekonomi dan komersial dari Slovakia, diplomasi ekonomi merupakan aktivitas resmi diplomatik yang fokus pada tujuan kepentingan ekonomi suatu negara dalam level internasional. Hal ini mencakup upaya peningkatan ekspor, menarik investasi asing, dan partisipasi kerja dalam berbagai organisasi ekonomi internasional.[[25]](#footnote-26)

Konsep diplomasi ekonomi sendiri pertama dikenalkan oleh Jepang. Pasca kekalahannya di Perang Dunia II, Jepang sangat kekurangan suara dan pengaruhnya secara politik, militer, dan segala bentuk tradisional dalam area diplomasi. Pada pertengahan 1950-an terjadi peningkatan dan pertumbuhan pesat terhadap perekonomian Jepang yang terlihat dari besarnya *demand* sumber daya dan pasar sejak itu. Hal ini ternyata erat kaitannya dengan konsep diplomasi ekonomi yang diformulasikan oleh Jepang pada masa pemerintahan Nobusuke Kishi, dimana diplomasi ekonomi mulai diiplementasikan pada hubungannya dengan negara-negara di Asia Tenggara.[[26]](#footnote-27)

Diplomasi ekonomi secara ilmiah mempelajari tentang hubungan diplomasi dan perdagangan yang kompleks, kerjasama, dan cara mempengaruhi kebijakan ekonomi eksternal. Sama seperti diplomasi pada umumnya, diplomasi ekonomi merupakan komponen dari kebijakan luar negeri yaitu aktivitas internasional suatu negara. Kebijakan luar negeri menentukan tujuan dan sasaran dari diplomasi ekonomi yang pada akhirnya harus kembali mencerminkan seluruh aktivitas, bentuk, tujuan, dan metode yang digunakan untuk merealisasi kebijakan luar negeri tersebut. Baranay menyatakan bahwa diplomasi ekonomi merupakan faktor kunci utama perekonomian dalam upaya mencapai tujuan-tujuan kebijakan luar negeri.[[27]](#footnote-28)

Perkembangan peran dan fungsi diplomasi ekonomi pada sistem ekonomi internasional modern didorong oleh berbagai faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Proses internasionalisasi dan penguatan dependensi sistem ekonomi dunia mengarahkan pada dua hal, yaitu integrasi global dan regional;
2. Ekspansi pesat yang terjadi pada ekonomi pasar, liberalisasi perekonomian nasional, dan peningkatan interaksi negara melalui perdagangan dan investasi internasional, serta peningkatan aktor ekonomi global seperti perusahaan multinasional, bank, dan kelompok investasi;
3. Globalisasi ekonomi; gabungan antara proses internasionalisasi dan peningkatan peran perusahaan multinasional berdampak pada peningkatan peran diplomasi ekonomi. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi berperan dalam mendorong perkembangan internasionalisasi di negara, namun disisi lain juga menahan kekuatan dari negara atau aktor lain yang berusaha memonopoli keuntungan dari globalisasi tersebut;
4. Bentuk adaptasi terhadap metode manajemen progresif, efisiensi energi, dan teknologi baru – sehingga investasi asing dapat memastikan perkembangan kerjasama antarnegara dan organisasi internasional;
5. Perkembangan inovasi ekonomi negara terhadap keterbukaan ekonomi eksternal.

Hal ini berdampak pada pembangunan citra positif negara yang akan menarik wisata asing dan daya tarik investasi asing sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara[[28]](#footnote-29).

Menarik investasi asing merupakan isu esensial dalam diplomasi ekonomi. Untuk menciptakan kesempatan tersebut, diplomasi ekonomi dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara eksportir dan partner dagangnya, untuk menjelaskan dan menyusun prioritas serta memperlihatkan aspek – aspekmana yang menguntungkan apabila kegiatan ekspor-impor dilakukan. Selanjutnya, fungsi lain adalah untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas perdagangan internasional, melobi kepentingan perusahaan domestik di luar negeri, bantuan politik dan perdagangan, mobilisasi sumber daya eksternal yang efektif untuk tujuan pembangunan, serta yang paling utama adalah untuk mempertahankan kondisi yang menguntungkan dari kerjasama ekonomi internasional yang mampu mendorong dan meningkatkan level dan kualitas kehidupan masyarakat.[[29]](#footnote-30)

Beberapa faktor penting yang membuat diplomasi ekonomi berjalan sukses, yaitu sebagai berikut:[[30]](#footnote-31)

1. Hubungan ekonomi luar negeri melibatkan tidak hanya kementerian luar negeri, perdagangan, dan industri negara yang bersangkutan, namun juga melibatkan segala unit bisnis di negara tersebut, seperti asosiasi perdagangan dan industri, sektor finansial, sekolah dan lembaga penelitian bisnis, industri pariwisata, dan aktor domestik yang merupakan stakeholder sekaligus prime mover;
2. Struktur kementerian luar negeri dan badan pengaturan ekonomi eksternal harus teringerasi dan selaras. Kebijakan ini telah banyak diambil oleh negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, Islandia, dan negara lain seperti Australia, Brunei, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru dan beberapa negara di Karibia. Negara-negara Skandinavia diatas telah secara utuh mengintegrasikan promosi perdagangan dan investasi, serta kebijakan perdagangan dan bantuan luar negeri kedalam kementerian luar negeri;
3. Membuat prioritas “kembar” diplomasi ekonomi yaitu antara promosi ekspor dan mobilisasi kedalam investasi asing. Promosi ekspor mencakup bantuan terhadap perusahaan domestik yang mencari pasar di luar negeri; studi pasar, kunjungan delegasi bisnis, partisipasi dalam pertemuan perdagangan internasional, serta pertemuan pembeli-penjual;
4. Kerangka peraturan dagang yang secara sah ditentukan oleh pemerintah merupakan pemikiran bersama dengan pelaku bisnis serta *think-tanks* dan *scholar* yang bertujuan untuk membentuk kondisi yang meningkatkan perdagangan dan investasi negara;
5. Harus membedakan antara diplomasi ekonomi yang beroperasi di ibukota negara dan di lapangan melalui jaringan yang ada di kedutaan dan konsuler;
6. Adanya perbedaan efektivitas diplomasi ekonomi di tiap-tiap negara. Misi diplomatik yang dijalankan oleh orang-orang terlatih dan staf profesional memberikan keuntungan power dan pengaruh negara yang diwakilinya.

Melihat definisi di atas, diplomasi ekonomi merupakan elemen penting bagi negara dalam mengelola relasi ekonominya dengan dunia luar karena hubungan ekonomi internasional tidak terjadi dalam ruang hampa yang hanya mengandalkan kekuatan pasar seperti yang diasumsikan oleh para ekonom neoklasik. Dalam pemahaman ini, diplomasi ekonomi kemudian menjadi senjata penting bagi negara - negara untuk dapat bekerjasama ataupun berkonflik di sistem internasional. Menurut van Bergeijk & Moons, diplomasi ekonomi mengandung tiga elemen, yakni:[[31]](#footnote-32)

1. Penggunaan pengaruh dan hubungan politik untuk mempromosikan dan atau mempengaruhi perdagangan dan investasi,
2. Pemanfaatan aset - aset ekonomi untuk meningkatkan biaya konflik dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan,
3. Upaya untuk mengkonsolidasikan iklim politik dan lingkungan internasional untuk mencapai tujuan - tujuan ini.

Jika melihat elemen di atas, maka akan ada perbedaan antara kapabilitas negara - negara dalam melakukan diplomasi ekonomi. Perbedaan ini bisa dikarenakan faktor internal maupun faktor eksternal, baik dalam kemampuan material maupun non-material. Dalam kondisi seperti ini, akan terjadi ketimpangan dalam praktek diplomasi ekonomi antara negara dengan kapasitas lebih dan kapasitas kurang, dimana dalam konteks ekonomi global diejawantahkan sebagai negara maju dan negara berkembang. Dalam diplomasi ekonomi yang menekankan pada proses negosiasi dan bukan pada struktur yang mempengaruhi ataupun isi kebijakan,[[32]](#footnote-33) maka kapasitas dan kompetensi institusional menjadi salah satu elemen penting. Dalam kapasitas ini, negara berkembang memiliki berbagai varian dan tipologi yang didasarkan pada berbagai faktor seperti koordinasi, manajemen kebijakan dan promosi perdagangan serta investasi. Kishan S. Rana membagi tipologi diplomasi ekonomi menjadi empat jenis yakni *traditional, niche-focused, evolving dan innovative.*

Perbedaan dari masing – masing tipologi dapat dilihat pada tabel dibawah. Meski tidak ada dikotomi yang tegas antara masing - masing jenis, tipologi ini dapat dijadikan gambaran awal untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi tipe diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh negara.

***Tabel 3: Tipologi Diplomasi Ekonomi[[33]](#footnote-34)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Traditional** | **Niche-Focused** | **Evolving** | **Innovative** |
| **External****Economic****Management** | Handled by the trade &economicministries;littleinvolvementof MFA | Promotionconcentrateson theidentifiedniche | Somecoordination between tradeand foreignministries;contestationalso likely | Joined-up andothercooperativearrangements |
| **Policy Management** | Limited rolefor MFA, frequent turf battles | Goodinternalcoordination | Inter-ministry or cabinetlevelcoordination;tendingtowardsimprovement | Institutionalisedmanagement,strong teamwork |
| **Role of Non-State Actor** | Episodic,depends onpersonality | Variable | New procedures,strongnetworking | Harmonisation with allstakeholders |
| **Economic Aid: Recipient** | Handled by economicagencies,seldomcoordinated with MFA | Limited coordination | Networking between theaidmanagementagency andMFA | ‘Graduated’ outof aid receipt, orclose to thatstage |
| **Economic Aid: Donor** | Unlikely to be an aiddonor | Unlikely to be an aiddonor | Modestprogram,usually coveringtechnicalcooperation | Expandingprogramme, run by MFA inharmony withtrade promotionagencies |
| **Trade Promotion** | Oftenhandled by acommercialcadre,outside MFA control | Limitedfocus oncommercialpromotion,outside theniche area | Cooperativearrangements,oftenintegration of political andeconomic work | Well-coordinatedactivities,rolemodel in rangeof activities |
| **Investment Promotion** | Handled by domesticagencies,limited roleof thediplomaticsystem | Active use of embassy network | MFAs and embassies work actively with homeagencies,oftenat individualinitiative | Strong teameffort, based ininstitutionalarrangements |
| **Regional Diplomacy Role** | Usually reactive | Focused onpreferredniche area | Active | Innovative,exploitation of potential |

*Sumber: Rana 2007.*

Dalam tipologi versi Rana, setidaknya terdapat delapan indikator yang dapat diturunkan untuk menilai aktivitas diplomasi ekonomi. Kendati tidak secara eksplisit memberikan indikator yang pasti untuk mengukur berhasil tidaknya diplomasi ekonomi suatu negara, jenis - jenis kegiatan yang tercakup dalam diplomasi ekonomi versi Rana dapat menjadi titik awal yang bagus.

1. **Praktek Diplomasi EkonomiIndonesia**

Secara umum, implementasi dari delapan elemen diplomasi ekonomi versi Rana yang dijalankan oleh Indonesia dapat dilihat adanya variasi dalam elemen diplomasi ekonomi sehingga cukup sulit menentukan tipe diplomasi ekonomi Indonesia. Dari kedelapan elemen di atas, lima aktivitas diplomasi ekonomi Indonesia dikategorikan sebagai tipe *traditional,* dua aktivitas lain sebagai *niche-focused* dan satu aktivitas sebagai tipe *evolving.* Adanya segmentasi dan perbedaan dalam aktivitas - aktivitas ini menunjukkan model diplomasi ekonomi Indonesia yang cenderung belum matang dan masih mencari bentuk serta strategi terbaik untuk pencapaian tujuan ekonomi eksternalnya.

Meskipun masih terdapat variasi dalam pengkategorian diplomasi ekonomi Indonesia, sebagian besar elemen diplomasi ekonomi Indonesia masih dikategorikan sebagai tipe tradisional atau bentuk yang paling sederhana. Untuk kasus Indonesia, permasalahan yang paling terlihat adalah masih melekatnya paradigma diplomasi tradisional dalam keseluruhan praktek diplomasi di Indonesia.

Jika melihat lima aktivitas diplomasi ekonomi Indonesia yang masih tergolong tradisional yakni *external economic management, policy management, role of non-state actor dan economic aid (donor dan recipient)*, maka dua masalah diataslah yang menjadi akar utamanya. Penguatan koordinasi antar instansi, termasuk menghilangkan egosektoral dapat menjadi pintu masuk untuk menghasilkan praktek diplomasi ekonomi yang komprehensif dan inklusif. Sedangkan menghilangkan persepsi umum mengenai diplomasi yang sifatnya tradisional dan hanya *high politics*, akan memperkuat peran - peran diplomat lain dalam praktek diplomasi ekonomi Indonesia.[[34]](#footnote-35)

Sesuai visi dan misi program era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2015-2019, salah satu program prioritas utama dalam kebijakan luar negeri adalah memperkuat kinerja diplomasi ekonomi Indonesia dengan tujuan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, di beberapakesempatan Presiden Jokowi mengemukakan diplomat Indonesia harus menjadi *“salesperson”* Indonesia di luar negeri dan tugas duta besar RI ke depan dititikberatkan pada diplomasi dagang ketimbang diplomasi politik. Guna mencapai tujuan tersebut, diplomat Indonesia dituntut untuk memahami benar kebutuhan di negara tujuan dan proaktif untuk memasarkan produk Indonesia untuk memenuhi permintaan negaratujuan tersebut. Namun demikian, dalam menjalankan diplomasi ekonomi Indonesia tentu terdapat berbagai tantangan baik dari lingkup domestik maupun global. Kondisi geoekonomi global merupakan salah satu tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Sedangkan, di lingkungan domestik, lemahnya infrastruktur dan daya saing ekspor masih merupakan tantangan besar Indonesia.[[35]](#footnote-36)

Dalam mendukung tujuan tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sebagai ujung tombak atau garda terdepan diplomasi Indonesia telah menekankan diplomasi ekonomi menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini tertuang dalam Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Kemlu Tahun 2015-2019, dimana penguatan diplomasi ekonomi merupakan salah satu dari 8 arah kebijakan yang disepakati. Selain Kemlu, instansi Pemerintah terkait lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) turut berperan penting dalam mendukung diplomasi ekonomi Indonesia.[[36]](#footnote-37)

Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi pada suatu kesempatan menjelaskan bahwa Kemlu RI memiliki tekad “Diplomasi untuk Rakyat, Diplomasi Membumi” dalam arti kinerja Kemlu tidak akan memiliki jarak dengan rakyat serta dapat dirasakan manfaatnya secara langsungoleh rakyat. Dalam membumikan diplomasiekonomi, Menlu RI dalam pernyataan pers tanggal 29 Oktober 2014 menekankan setidaknya terdapat 4 pilar diplomasi ekonomi yakni: melakukan perluasan dan peningkatan akses pasar produk Indonesia dengan mendorong perubahan *mindset* para diplomat Indonesia agar lebih aktif melakukan diplomasi ekonomi bahkan terjun langsung di lapangan, penguatan kapasitas dan sumber daya perwakilan RI di pasar non-tradisional, atau *“untapped market”*, mendorong investasi asing pada sektor prioritas Indonesia, sebaliknya juga melindungi investasi Indonesia di luar negeri.[[37]](#footnote-38)

Salah satu aspek penting dari diplomasi ekonomi adalah meningkatkan kerjasama perdagangan, investasi dan pariwisata *(Trade, Tourism, Investment /* TTI*)*. Adapun tujuanutama kerjasama TTI tersebut adalah mendorong ekspor Indonesia, meningkatkan investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Selain itu, TTI merupakan sumber devisa penting bagi perekonomian Indonesia dan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Indonesia memiliki sasaran TTI yaitu: pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 11.6 persen per tahun; meningkatnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) danPenanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Rp. 933 triliun pada tahun 2019; serta meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 20 juta orang pada tahun 2019.[[38]](#footnote-39)

Sasaran strategis ini diukur melalui indeks diplomasi ekonomi disertai dengan target setiaptahun sampai dengan 2019. Indeks tersebut diperoleh dari komponen dengan pembobotansebagaimana tabel di bawah.

***Tabel 4: Sasaran Strategis Diplomasi Ekonomi Indonesia[[39]](#footnote-40)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target (setelah pembobotan) |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Diplomasi ekonomi yang kuat | Indeks Diplomasi Ekonomi | 67 % | 72% | 79% | 85% | 92% |

 *Sumber: Kemlu RI*

Indonesia memiliki banyak kekuatan dan potensi ekonomi seperti sumber daya alam dan bonus demografi (surplus pekerja usia produktif) yang jika dikekola dan dioptimalkan dengan baik dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat perekonomian nasional di masa mendatang. Bahkan Indonesia diprediksi akan menjadi negara ke-4 perekonomian terbesar dunia pada tahun 2050.[[40]](#footnote-41) Namun upaya untuk mencapaitarget tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang ada saat ini dan di masa mendatang.

Secara fisik, Indonesia adalah sebuah negara besar dengan berbagai keunggulan. Bukan hanya sumber daya alam dan potensi pasar karena jumlah penduduk yang amat besar semata. Posisi geografi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua lautan mempunyai keunggulan yang unik yang tidak banyak dimiliki negara lain. Teritorial laut dan udara Indonesia jelas merupakan aset tersendiri yang unik yang dapat di jadikan *“bargaining power”* untuk bisa memperoleh *“bargaining position”* yang menguntungkan dalam diplomasi ekonomi.[[41]](#footnote-42)

Kondisi geografi dan fisik Indonesia ini mempunayi peran yang amat penting dalam diplomasi ekonomi, karena wilayah Indonesia ini dapat mempengaruhi distribusi barang-barang hasil produk dan jasa kegiatan ekonomi (seperti produk industri, transportasi laut dan udara, bahkan jaringan virtual untuk kegiatan ekonomi keuangan, yaitu kabel laut untuk sambungan internet antara benua Asia dan Australia, antara Lautan Teduh dengan Lautan Hindia).

Dalam era globalisasi, yaitu proses integrasi antar negara-negara guna memudahkan transaksi dalam berbagai bidang, membebaskan pasar untuk produk dan jasa, serta untuk menggalang “kekuatan” di berbagai bidang untuk menghadapi “kekuatan” lain, peran diplomasi ekonomi semakin penting guna memaksimalkan perolehan atas hal-hal yang diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.[[42]](#footnote-43)

1. **Forum G20 *(Group of Twenty)***
2. **Latar Belakang Pembentukan Forum G20**

Lahirnya G20 dilatarbelakangi oleh konteks globalisasi yang terus menguat.pandangan bahwa dunia menjadi semakin kecil, dan tidak ada negara yang tidak rentan terhadap pengaruh yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Saling ketergantungan di antara negara menjadi ciri sentral dari tren globalisasi kontemporer dan dalam konteks ini kerjasama di antara negara-negara di dunia menjadi suatu keharusan.[[43]](#footnote-44)

Serangkaian krisis ekonomi yang terjadi pada dekade tahun 1990-an membuktikan bahwa dunia baru membutuhkan pendekatan baru untuk merespon dunia yang semakin kecil. Nilai Peso Mexico jatuh di bulan Desember 1994 menandai krisis finansial di negara ini yang imbasnya dirasakan pada negara-negara di Amerika Selatan. Indonesia, Thailand dan Korea Selatan mengalami krisis moneter yang parah pada tahun 1997 dan dampaknya dirasakan di negara-negara di kawasan Asia.[[44]](#footnote-45)Kerentanan finansial juga dirasakan di Rusia pada tahun 1998; di Brazil pada tahun 1998-2002, Turki pada tahun 1999-2002, dan Argentina pada tahun 2000-2001. Berbagai negara seperti China dan India telah merespon krisis dengan berbagai cara, apapun cara yang ditempuh telah beresiko pada meledaknya angka pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat, lebih lanjut ini berdampak sistemik pada transaksi perdagangan dunia.

Krisis finansial yang terjadi pada tahun 1990an tersebut menjadi perhatian serius menteri-menteri keuangan negara-negara maju dan mengantarkan pada pengakuan bahwa sudah saatnya mereka harus mengajak negara-negara yang perekonomiannya menguat (emerging economies) untuk bergabung dalam diskusi tentang penataan struktur finansial global. Adalah Paul Martin, Menteri Keuangan Kanada dan Lawrence Summer, menteri Keuangan Amerika Serikat yang kemudian mengambil inisiatif untuk memulai penyelenggaraan dialog-dialog G22 dan G33, dimana negara-negara dengan perekonomian yang signifikan secara geografis dan ekonomik turut diundang di dalamnya. Dialog G20 yang reguler diselenggarakan pada bulan Desember 1999 danterus dilembagakan setiap tahunnya hingga saat ini. G20 disebut oleh para perintisnya sebagai terobosan baru *“to make a smaller world governable and fairer”* (untuk membuat dunia yang semakin kecil dapat dikelola dan lebih adil).[[45]](#footnote-46)

G20 dapat didefinisikan sebagai sebuah komite baru untuk mengelola isu-isu ekonomi global. Komite yang awalnya beranggotakan menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 8 negara G-8 ditambah 10 negara dengan perekonomian yang menguat plus Australia dan Uni Eropa. G20 dipandang sebagai kompromi baru yang lebih baik antara kerjasama-kerjasama multilateral yang ada. Jumlahnya yang lebih besar, sekalipun tidak terlalu besar dibandingkan G-7, memberikan peluang bagi dialog-dialog yang lebih luwes dengan hasil nyata yang lebih cepat, jumlahnya tentu jauh lebih sedikit dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (192 negara) yang terkesan sangat lambat dalam penanganan isu-isu krusial yang dihadapi dunia. Dengan penetapan jumlah yang terbatas, G20 meyakini kemampuan dan efektivitas untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Pertemuan-pertemuan rutin pun digelar sejak pertemuan pertama G20 di Berlin, Jerman. G20 fokus pada penanganan krisis ekonomi, kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, penguatan sistem finansial di masing-masing negara anggota dan, sebagai respon terhadap serangan teroris 9/11 di gedung kembar New York, kerjasama dalam pembekuan pendanaan terorisme. Dialog kemudian mengembangkan diskusi pada pentingnya reformasi lembaga-lembaga keuangan *Bretton Woods* (IMF dan Bank Dunia). Reformasi ini dilihat sebagai prekondisi penting untuk memperkuat struktur finansial global yang relatif kokoh dalam mengantisipasi krisis ekonomi di masa depan.[[46]](#footnote-47)

***Gambar 2: G20 Sebagai Forum Utama Kerjasama Ekonomi[[47]](#footnote-48)***

 *Sumber: disusun oleh Y.P. Hermawan dari berbagai sumber.*

Krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2007 semakin menempatkan pentingnya G20. Para pendukung pelembagaan G20 melihat perlunya peningkatan dialog G20 dari level kementrian ke level Konferensi Tingkat Tinggi. Hanya pemimpin politik yang dapat membuat keputusan – keputusan strategis yang sekalipun tidak *legally binding* (mengikat secara hukum) namun berimplikasi pada pemenuhan komitmen politik yang lebih kuat. Dengan demikian kesepakatan yang dibuat dalam forum *intergovernmental* di tingkat tertinggi akan membawa penyesuaian-penyesuaian kebijakan di masing – masing negara, termasuk keputusan yang sifatnya teknis. Menjadikan forum G20 di tingkat pemimpin tertinggi membuat keputusan – keputusan yang dibuat dalam forum tersebut menjadi *implementable* (bersifat dapat diterapkan)[[48]](#footnote-49).

KTT G20 pertama diselenggarakan di Washington tahun 2008, kemudian dilanjutkan di London (2009), Pittsburgh (2009), Toronto (2010) dan Seoul (Nopember 2010). Ketiga KTT pertama berfokus utama pada upaya darurat dalam merespon krisis finansial. Koordinasi makro dilakukan untuk mengelola toxic asset dan rekapitalisasi perbankan dan stimulus fiskal sebesar 2% PDB[[49]](#footnote-50).

Dalam KTT Washington, pemimpin – pemimpin G20 menyepakati tindakan – tindakan mendesak yang harus dilakukan seperti mengupayakan secara serius tindakan – tindakan untuk menstabilisasi sistem finansial; mendukung kebijakan moneter yang tepat dan diperlukan bagi kondisi domestik; menggunakan kenijakan – kebijakan fiskal untuk menstimulasi permintaan domestik bagi dampak yang cepat sementara tetap menjaga kerangka kebijakan yang kondusif bagi keberlanjutan fiskal; membantu negara – negara berkembang untuk mendapatkan akses bagi keuangan dalam kondisi finansial yang sulit termasuk melalui fasilitas likuiditas dan dukungdukungan program; mendukung Bank Dunia dan Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) untuk menggunakan kemampuannya untuk mendukung program – program pembangunan; dan menjamin bahwa IMF, Bank Dunia dan bank – bank pembangunan lain mempunyai sumber dana yang mencukupi dalam memainkan peran mereka dalam menangani krisis.

Dalam KTT di Washington ini juga disepakati lima prinsip dalam reformasi pasar finansial dan rejim regulasi untuk menghindarkan krisis serupa dimasa yang akan datang. Prinsip – prinsip tersebut adalah[[50]](#footnote-51):

1. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas;
2. Peningkatan Regulasi yang kuat;
3. Promosi integritas dalam Pasar Finansial;
4. Promosi kerjasama internasional;
5. Reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional.

Empat kelompok kerja secara khusus dibentuk untuk menangani isu-isu spesifik. Empat kelompok kerja tersebut adalah[[51]](#footnote-52):

1. Kelompok Kerja 1 menangani *Hedge funds* dan instrumen turunannya, standar akuntansi, agen – agen *credit rating*;
2. Kelompok Kerja 2 menangani pembentukan FSB, Sanksi bagi *tax haven*, dan *supervisory College*;
3. Kelompok Kerja 3 menangani *flexible credit line* dan peningkatan capital IMF sebesar 750 billion dollar AS;
4. Kelompok Kerja 4 menangani *Budget Support* USD 100 billion, GCI ADB 200% dan *Trade Financing* USD 250 billion.

Keempat kelompok kerja ini merupakan pendekatan G20 untuk mengedepankan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam KTT Washington.

Dalam KTT di London dan Pittsburgh sertapertemuan – pertemuan lanjutan di tingkat pejabat senior, kementrian dan Bank Sentral, pelaksanaan komitmen – komitmen bagi tindakan mendesak tersebut dievaluasi dalam laporan kemajuan *(progress report)[[52]](#footnote-53)*dan ditindaklanjuti dengan komitmen – komitmen baru. Satuan tugas khusus dibentuk untuk menyusun rancangan agenda dan rencana – rencana aksi.

Untuk menghindarkan perdebatan yang sering terjadi di KTT lain, G20 fokus pada komonalitas di antara anggota – anggotanya. KTT mengadopsi prinsip – prinsip esensial yang tidak hanya membentuk citra dan nilai simbolik, tetapi juga meningkatkan profil G20 yang penting secara politik. Ini penting untuk membuat G20 dapat memulai suatu diskusi tentang bagaimana membangun stabilitas dan kapabilitas untuk mengelola krisis ekononomi, isu – isu yang otoritasnya berada di tangan manteri – menteri keuangan dan gubernur bank sentral.

Selain pertemuan tingkat tinggi, pertemuan pejabat senior, menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral, G20 juga memiliki organ pertemuan Sherpa. Pertemuan Sherpa diselenggarakan sebelum KTT yang dimaksudkan untuk mensinkronisasikan isu – isu yang secara khusus akan diagendakan dalam KTT[[53]](#footnote-54). Dengan demikian pertemuan di tingkat leader dapat menjadi lebih efektif karena lebih fokus pada masalah – masalah dan kepentingankomonalitas dengan pendekatan yang telah disepakati bersama di tingkat pejabat senior, kementerian dan pejabat Sherpa. Ini dilakukan untuk menghindariperbedaan – perbedaan yang dikhawatirkan justru akan memperpanjang perdebatan di tingkat pimpinan negara.

1. **Negara Anggota Forum G20**

The Group of Twenty Countries kelompok 20 ekonomi utama (G20) adalah kelompok 19 negara dengan pertumbuhan perekonomian yang tinggi di dunia, ditambah dengan satu organisasi regional yaitu Uni Eropa.

G20 mewakili 85 persen dari output global dan dua pertiga dari populasi dunia dengan negara-negara G7, 12 negara berkembang dan Uni Eropa. Keanggotaan kelompok mencakup kelompok negara-negara maju (G7) yaitu: Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat atau advanced countries. Berserta 12 negara berkembang yaitu: Brazil, India, Rusia, dan China (BRIC), serta Indonesia, Afrika Selatan, Argentina, Australia, Arab Saudi, Korea selatan, Turki, Meksiko.

***Tabel 5: Negara-Negara Anggota G20***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Negara** | **Ibu Kota** | **Populasi 2015 (ribu)** | **PDB 2015 (dalam juta USD)** |
| **1** | Afrika Selatan  | Cape Town | 54,956.92 | 314,571.95 |
| **2** | Amerika Serikat  | Washington DC | 321,418.82  | 18,036,648.00 |
| **3** | Arab Saudi  | Riyadh | 31,540.37  | 646,001.87 |
| **4** | Argentina  | Buenos Aires | 43,416.75 | 583,168.57 |
| **5** | Australia  | Canberra | 23,781.17 | 1,339,140.53 |
| **6** | Brazil  | Brasilia | 207,847.53 | 1,774,724.82 |
| **7** | Inggris (Britania Raya)  | London | 65,138.23 | 2,858,003.09 |
| **8** | China (Tiongkok)  | Beijing | 1,371,220.00 | 11,007,720.59 |
| **9** | India  | New Delhi | 1,311,050.00 | 2,095,398.35 |
| **10** | Indonesia  | Jakarta | 257,563.82 | 861,933.97 |
| **11** | Italia  | Roma | 60,802.08 | 1,821,496.96 |
| **12** | Jepang  | Tokyo | 126,958.47 | 4,383,076.30 |
| **13** | Jerman  | Berlin | 81,413.15 | 3,363,446.82 |
| **14** | Kanada  | Ottawa | 35,851.77 | 1,550,536.52 |
| **15** | Korea Selatan  | Seoul | 50,617.04 | 1,377,873.11 |
| **16** | Meksiko  | Ciudad de Mexico | 127,017.22 | 1,143,793.18 |
| **17** | Perancis  | Paris | 66,808.38 | 2,418,835.53 |
| **18** | Russia  | Moskwa | 144,096.81 | 1,331,207.75 |
| **19** | Turki  | Ankara | 78,665.83 | 717,879.79 |
| **20** | Uni Eropa  | Brussels | 509,668.36 | 16,311,897.17 |

*Sumber: disusun oleh Jean Phylips Rieuwpassa dari berbagai sumber.*

**Gambar 3:Peta Penyebaran Negara Anggota G20**

*Sumber: www.G20.org*

**Gambar 4: Peta Penyebaran GDP Negara Anggota G20**

****

1. **Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Sebagai Perwakilan Indonesia Di Forum G20**
2. **Bank Indonesia**

Bank Indonesia adalah bank sentral negara Repunlik Indonesia yang pendiriannya dimulai dengan De Javasche Bank N.V. yang berevolusi dari bank sirkulasi hingga menjadi bank setral saat ini. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang – Undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. menjadi Bank Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai Bank Sentral dan Bank Sirkulasi. Undang - undang tersebut diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 11/1953 dan Lembaran Negara No. 40. Dengan UU dan Lembaran Negara tersebut dikeluarkan UU Pokok Bank Indonesia yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1953. Dengan dikeluarkannya UU Pokok Bank Indonesia itu, semakin kukuhlah Bank Indonesia sebagai Bank milik Pemerintah RI. Dalam UU pokok BI tersebut, modal BI ditetapkan sebanyak Rp. 25 juta, dan bertindak sebagai bank sentral dan bank sirkulasi[[54]](#footnote-55).

* 1. **Status dan kedudukan[[55]](#footnote-56)**
1. ***Lembaga negara yang independen***

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang – undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang – undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal – hal yang secara tegas diatur dalam undang – undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang – undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

1. ***Sebagai badan hukum***

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang – undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan – peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang – undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

* 1. **Tujuan dan tugas[[56]](#footnote-57)**
		+ 1. ***Tujuan tunggal***

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas – batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

* + - 1. ***Tugas***

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi tiga pilar.

**Gambar 5: Tiga Pilar Tugas dan Fungsi Bank Indonesia**

*Sumber: Bank Indonesia*

* 1. **Visi, misi dan nilai – nilai strategis[[57]](#footnote-58)**
		+ 1. ***Visi***

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

* + - 1. ***Misi***
1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional;
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional;
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai – nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

* + - 1. ***Nilai – nilai Strategis***

*Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork.*

* 1. **Hubungan kerjasama internasional yang dilakukan Bank Indonesia[[58]](#footnote-59)**

BI menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. BI menjalin kerjasama internasional meliputi bidang – bidang:

1. Intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing;
2. Penyelesaian transaksi lintas negara;
3. Hubungan koresponden;
4. Tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas – tugas selaku bank sentral;
5. Pelatihan/penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran.
	* + 1. ***Keanggotaan Bank Indonesia di beberapa lembaga dan forum internasional atas nama Bank Indonesia sendiri antara lain:***
6. *The South East Asian Central Banks Research and Training Centre (SEACEN Centre)*, 1982, 12 bank sentral,

merupakan pusat penelitian dan pelatihan bagi pegawai bank sentral yang menjadi anggotanya dari kawasan Asia Tenggra di bidang keuangan, moneter, perbankan, kebanksentralan, dan ekonomi pembangunan. Termasuk juga memprakarsai dan memfasilitasi kerjasama dalam bidang penelitian dan pelatihan yang berhubungan dengan aspek kebijakan dan operasional bank sentral, survei ekonomi dan prakiraan *(outlook)* tahunan, dan publikasi hasil survei, analisa dan telaah ulang;

1. *The South East Asian, New Zealand and Australia Forum of Banking Supervision (SEANZA)*, 1957, 20 bank sentral,

dibentuk terutama untuk membantu mengatasi masalah keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dan berpengalaman, khususnya pada tingkat manajerial menengah ke atas, yang dihadapi bank sentral negara – negara di kawasan Asia Pasifik;

1. *The Executive' Meeting of East Asian and Pacific Central Banks (EMEAP)*, 1991, 11 bank sentral,

merupakan organisasi kerjasama bank sentral dan otoritas moneter di kawasan Asia dan Pasifik yang bertujuan mempererat hubungan kerjasama sesama anggotanya. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk *Governors Meeting* dan *Working Group*. Bentuk lainnya antara lain pembentukan jejaring regional untuk pertukaran informasi;

1. *ASEAN Central Bank Forum (ACBF)*, 2002, 10 bank sentral,

dibentuk dengan tujuan untuk mengevaluasi perekonomian dan risiko keuangan yang mungkin timbul dengan menekankan pada *policy option* dan implikasinya, serta mendorong dilakukannya langkah awal untuk meminimalisasi risiko tersebut dengan bantuan dari beberapa lembaga multilateral baik ditingkat regional maupun internasional;

1. *Bank for International Settlement (BIS)*, Mei 1943, 49 bank sentral,

merupakan forum kerjasama keuangan dan moneter internasional, sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam menyediakan jasa keuangan dalam pengelolaan devisa, menjadi pusat riset ekonomi dan moneter, dan memberikan kontribusi dalam memahami pasar keuangan internasional, serta sebagai forum pembahasan hasil riset moneter dan perbankan.

* + - 1. ***Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia antara lain:***
1. *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*, Agustus 1967, 10 negara,

merupakan asosiasi negara – negara di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan perkembangan kultural di kawasan ini. Selain itu juga untuk mendorong stabilitas ekonomi dan politik dan memecahkan berbagai isu di kawasan ini;

1. *ASEAN+3 (ASEAN + Cina, Jepang dan Korea)*, 1997, 13 negara,

merupakan forum kerjasama di bidang ekonomi dari negara – negara ASEAN ditambah Cina, Jepang dan Korea Selatan. Kerjasama ini di masa yang akan datang akan terus ditingkatkan sehingga meliputi juga berbagai bidang politik dan keamanan untuk mendorong perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan di kawasan ini. Forum yang digelar antara lain berbentuk Pertemuan Puncak dan Pertemuan tingkat Menteri;

1. *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, 1989, 21 negara,

adalah forum utama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomim dan kerjasama perdagangan dan investasi di kawasan sekitar Asia dan Pasifik. Anggotanya meliputi 47% perdagangan dunia. Tiga aspek prioritasnya adalah liberalisasi perdagangan adn investasi, memfasilitasi kegiatan usaha, dan kerjasama ekonomi dan teknis;

1. *Manila Framework Group (MFG)*, November 1997, 14 negara (bank sentral dan Departemen Keuangan),

dibentuk setelah terjadinya krisis di beberapa negara Asia pada pertengahan 1997. Tujuannnya adalah menyediakan forum untuk mendiskusikan isu-isu yang mempengaruhi stabilitas keuangan di kawasan ini. Grup ini bertemu dua kali setahun, yang dihadiri oleh pejabat Departemen Keuangan dan bank sentral negara anggotanya, ditambah wakil dari IMF, WB, BIS dan ADB;

1. *Asia-Europe Meeting (ASEM)*, 1996, 25 negara,

merupakan forum kerjasama negara Asia dan Eropa untuk memelihara perdamaian secara global, stabilitas, dan kemakmuran yang bertujuan untuk memajukan kegiatan perdagangan dan investasi yang lebih besar antara dua kawasan melalui liberalisasi perdagangan dan investasi serta fasilitasi di antara negara anggota;

1. *Islamic Development Bank (IDB)*, Juli 1975, 54 negara anggota OIC,

merupakan agen pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan perkembangan sosial negara anggotanya dan komunitas muslim, baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam rangka mencapai tujuan, IDB berpartisipasi dalam *equity capital* 'modal ekuitas' dan pemberian pinjaman untuk proyek – proyek produktif dan untuk perusahaan – perusahaan, selain juga menyediakan bantuan keuangan kepada negara – negaranya dalam bentuk lain untuk pembangunan ekonomi dan sosial;

1. *International Monetary Fund (IMF)*, Desember 1945, 184 negara,

merupakan organisasi internasional yang dibentuk sesuai dengan kesepakatan konferensi *Breeton Woods* tahun 1944 yang ditujukan untuk mendorong kerjasama moneter internasional untuk menghindari terjadinya kembali *economic disaster* seperti *great depression* tahun 1930an. Indonesia bergabung Februari 1967 (setelah pernah bergabung sebelumnya dan keluar). IMF memfasilitasi perluasan dan pertumbuhan yang seimbang dari perdagangan internasional, mendorong stabilitas nilai tukar, membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral, dan membantu pendanaan bagi negara – negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran. Secara lebih umum IMF bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas sistem keuangan internasional;

1. *World Bank*, termasuk keanggotaan di *Intenational Bank of Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA)* dan *International Finance Cooperatioan (IFC),* serta *Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA),* Juli 1944, 184 negara,

merupakan organisasi internasional yang juga dibentuk sesuai dengan kesepakatan *Bretton Woods* tahun 1944 yang merupakan sumber terbesar di dunia untuk bantuan pembangunan. Indonesia bergabung April 1967. Bank Dunia bukanlah bank seperti pada umumnya melainkan sebuah agen pembangunan khusus dari PBB yang terdiri dari lima organisasi yakni IBRD *(International Bank for Recunstruction and Development)*, IFC *(International Finance Corporation)*, MIGA *(Multilateral Investment Guarantee Agency)* dan ICSID *(International Centre for Settlement of Investment Disputes)*. Pada perkembangannya, Bank Dunia menjadi nama yang digunakan untuk IBRD dan IDA;

1. *World Trade Organization (WTO)*, 1995, 146 negara,

merupakan forum negosiasi kebijakan/peraturan perdagangan internasional yang antara lain bertujuan untuk menangani perselisihan perdagangan, memonitor kebijakan perdagangan nasional negara anggota, memberikan bantuan berupa pelatihan dan bantuan teknis bagi negara – negara yang sedang berkembang, dan menjalin kerjasama dengan organisasi internasional lainnya;

1. *Intergovernmental Group of 20 (G20)*, September 1999, 19 negara, EU, IMF dan IBRD,

merupakan forum internasional Menteri Keuangan dan Gubernur bank sentral dari negara-negara industri dan berkembang untuk mendorong stabilitas keuangan dan ekonomi setelah terjadinya krisis keuangan dan perbankan di Asia pada pertengahan 1997. G20 dibentuk atas prakarsa G7. Agenda grup kemudian meluas sampai kepada masalah – masalah dan tantangan – tantangan globalisasi dan cara – cara untuk mengurangi kejahatan terorisme keuangan. G20 mendorong pertukaran pandangan secara informal dan pembentukan konsensus mengenai isu – isu internasional.

* + - 1. ***Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia sebagai pengamat, antara lain:***
1. *Intergovernmental Group of 15* (G15), Februari 1999, 17 negara berkembang dari Asia, Afrika dan Amerika Selatan,

merupakan kelompok dari 17 negara – negara berkembang dari Asia, Afrika dan Amerika Latin yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan memberikan input untuk kelompok internasional lain seperti WTO dan G7 (kelompok 7 negara industri kaya);

1. *Intergovernmental Group of 24* (G24), 1971, 24 negara,

merupakan kelompok dari 24 negara berkembang dari Afrika, Amerika Selatan, Karibia, Asia dan Eropa, yang tujuan utamanya adalah untuk menggalang persatuan posisi dari negara – negara berkembang dalam isu – isu moneter dan pembangunan keuangan. G24 beroperasi melalui dua level yaitu level politis di tingkat Menteri Keuangan/Gubernur bank sentral dan level official di tingkat Deputi.

1. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Di Indonesia, sejarah pengelola keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. Tiap pemerintahan, dari zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk dapat melaksanakan pembangunan perekonomian di pemerintahannya. Pengelolaan keuangan pemerintahan disini meliputi semua milik pemerintahan atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan. Keuangan yang dikelola berasal dari masyarakat yang berupa upeti, pajak, bea cukai, dan lain-lain.

1. **Status dan Kedudukan[[59]](#footnote-60)**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan (Menkeu) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Sri Mulyani. Kementerian Keuangan mempunyai motto *Nagara Dana Rakça* yang berarti penjaga keuangan negara.

Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara.

1. **Tugas dan Fungsi[[60]](#footnote-61)**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;
2. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
7. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
8. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
10. **Visi dan Misi[[61]](#footnote-62)**
11. ***Visi***

Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21.

1. ***Misi***
2. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
3. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
4. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
5. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
6. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisinilaipegawaiyangkompetitif.
1. DeePrasetyo, *Sejarah Diplomasi Indonesia*, (<https://moestopo.academia.edu/DeePrasetyo>, diakses pada tanggal 2 Maret 2017). [↑](#footnote-ref-2)
2. Roy Olton dan Jack C. Plano. *Internasional Relations Dictionary*. Diterjemahkan oleh Wawan Juanda. (Jakarta: Putra A. Bardhin CV. Cetakan Kedua, 1999), 201. [↑](#footnote-ref-3)
3. Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa.* (Jakarta: Deplu RI, 1996), 12. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid., 12. [↑](#footnote-ref-5)
5. MK. UU 1945 dan Perubahan. (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/UUD1945/Perubahan-204.pdf>, diakses pada tanggal 2 maret 2017). [↑](#footnote-ref-6)
6. Bantoro, Bantarto. 1991. *Diplomasi dan Politik Luar Negeri*. Dalam *Soesarto*, Hadi. *Untuk Kalangan Hidup Bangsa*. CSIS. [↑](#footnote-ref-7)
7. Dinh, Tranh Van. 1987. *Communication and Diplomacy in Changing World.*  [↑](#footnote-ref-8)
8. *Boundless Political Science Textbook, Foreign Policy, Diplomacy,* (<https://www.boundless.com/political-science/textbooks/boundless-political-sciencetextbook/foreign-policy-18/foreign-policy-108/diplomacy-573-4996/>, diakses pada 28 Februari 2017). [↑](#footnote-ref-9)
9. Solichin, Harianto dan Taat Subekti. Jurnal Diplomasi Ekonomi Indonesia. [↑](#footnote-ref-10)
10. Angayomi, N.A. Kontak Suku Aborigin Dengan Bangsa Makassar di Australia Utara. English Dept. UGM
Final Exam Kelas Arkeologi Pasifik. 2009. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-12)
12. Siagian, Muhnizar. Jurnal HI FISIP Universitas Andalas. Peranan Sjahrir Untuk Diplomasi Indonesia. [↑](#footnote-ref-13)
13. Solichin, Harianto dan Taat Subekti. *Op. Cit.,* hal 35. [↑](#footnote-ref-14)
14. Glossary Indonesia. (<http://www.country-data.com/frd/cs/indonesia/id_glos.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2017). [↑](#footnote-ref-15)
15. Bahagijo, Sugeng. Indonesia: *Governance within the Consultative Group on Indonesia. Partnership or domination?*  [↑](#footnote-ref-16)
16. Sabaruddin, Sulthon Sjahril. Kementerian Luar Negeri RI. *Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi.*  [↑](#footnote-ref-17)
17. Solichin, Harianto dan Taat Subekti. *Op. Cit.,* hal 35*.* [↑](#footnote-ref-18)
18. Rana, *“Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries”,* Chapter 11, Nicholas Bayne, and Stephen Woolcock, *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations,* 2nd edition (Ashgate, London, 2007) [↑](#footnote-ref-19)
19. Solichin, Harianto dan Taat Subekti. *Op. Cit.,* hal 35*.* [↑](#footnote-ref-20)
20. Bayne, N. dan S. Woolcock, 2007. *“What is Economic Diplomacy”,* dalam Bayne, N. dan S. Woolcock (eds.), 2007. *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiations in International Economic Relations.*

Ashgate Publishing Company. [↑](#footnote-ref-21)
21. Odell, J.S., 2000. *Negotiating the World Economy.* Cornell University Press. [↑](#footnote-ref-22)
22. Rashid, H.U., 2005. *“Economic Diplomacy in South Asia”*, Address to the Indian Economy & Business Update. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
24. Odell, J.S., 2000. *Negotiating the World Economy.Op. Cit.,* hal 39. [↑](#footnote-ref-25)
25. Baranay, Pavol. *Modern Economic Diplomacy*. Latvia: Publications of Diplomatic Economic Club, 2009. [↑](#footnote-ref-26)
26. Hao, Ye. *“Some Thoughts on Deepening Economic Diplomacy,”* China Institute of International Studies, (<http://www.ciis.org.cn/english/2014-01/20/content_6623715.htm>, diakses pada 13 Februari 2017). [↑](#footnote-ref-27)
27. Baranay, Pavol. *Modern Economic Diplomac. Op. Cit.,* hal 40*.* [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-30)
30. Rana, S. K. *“Economic Diplomacy: The Experience of Developing States,”. Op. Cit.,* 38. [↑](#footnote-ref-31)
31. van Bergeijk, P.A.G., dan S. Moons, 2007. *“Economic Diplomacy andEco-nomic Security”*, New Frontiers for Economic Diplomacy.Lisbon: Portugal. [↑](#footnote-ref-32)
32. Bayne, N., 2007. *“Economic Diplomacy in Practice”. Op. Cit.,* 39. [↑](#footnote-ref-33)
33. Rana, K. S. 2007a. *“Economic Diplomacy Negotiations”*, tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-35)
35. Sabaruddin, Sulthon Sjahril. Kementerian Luar Negeri RI. *Op. Cit.,* 38. [↑](#footnote-ref-36)
36. Rencana Strategis 2015-2019. Kementerian Luar Negeri RI. (<http://www.kemlu.go.id/AKIP/Rencana%20Strategis%20Kemlu%202015-2019.pdf>, diakses pada 23 Februari 2017). [↑](#footnote-ref-37)
37. Sabaruddin, Sulthon Sjahril. Kementerian Luar Negeri RI. *Op. Cit.,* 38. [↑](#footnote-ref-38)
38. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan., 2014, *“TTI Diplomacy: Kajian atas Kinerja Promosi Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Indonesia”*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta. [↑](#footnote-ref-39)
39. Rencana Strategis 2015-2019. Kementerian Luar Negeri RI.*Op. Cit.,* 48 [↑](#footnote-ref-40)
40. PricewaterhouseCoopers., 2015. *“The World in 2050: Will the Shift in Global Economic Power Contiue?”*, Februari., United Kingdom., (<https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf>, diakses pada 25 Februari 2017). [↑](#footnote-ref-41)
41. Solichin, Harianto dan Taat Subekti. *Op. Cit.,* hal 35*.* [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-43)
43. Keohane, Robert O. (2002). Power and Governance in A Partially Globalized World. London: Routledge; Karns, Margaret P and Mingst, Karen A. (2004) *International Organizations: The Politics and Porcess of Global Governance*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publisher; Cable, Vincent (1999) *Globalization and Global Governance*. London: Pinter; Schlte, Jan Art (2000). *Globalization: A Critical Introduction.* New York: St. Martin’s Press; Frank J. Lechner dan John Boli (eds.) (2000). *The Globalization*, Reader. Massachusetts, MA dan Oxford: Blackwell. [↑](#footnote-ref-44)
44. Genesis of the L-20 Project., Chapter 1., P. C. Heap. *Globalization and Summit Reform.* Springer Science &Business Media. LLC. 2008. [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-46)
46. Laporan Tim Riset G20. *“Peran Indonesia Dalam G20: Latar Belakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia”*. Friedrich Ebert Stiftung., Jakarta. 2011. [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-48)
48. Seperti disampaikan oleh Miranda Goeltom, mantan wakil Gubernur Bank Indonesia, dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh BPPK Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia 3 Agustus 2010, dalam Laporan Tim Riset G20. *“Peran Indonesia Dalam G20: Latar Belakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia”*. Friedrich Ebert Stiftung., Jakarta. 2011. [↑](#footnote-ref-49)
49. Laporan Tim Riset G20, *Op.Cit.,* hlm. 53. [↑](#footnote-ref-50)
50. *Summit Declaration on Financial Markets and the World Economy*, 15 November, 2008. [↑](#footnote-ref-51)
51. Laporan Tim Riset G20, *Op. Cit.,* 53. [↑](#footnote-ref-52)
52. Lihat *Progress Report on the Immediate Actions of the Washington Action Plan* disiapkan oleh Ketua G-20 perwakilan Inggris 4 Maret 2009; *Progress Report on the Actions of the Washington Action Plan*, 2 April 2009; *The Global Plan for Recovery and Reform*, 2 April 2009; *Progress Report on the Actions of the London and Washington G-20 Summits*, 6 September 2009; *Progress report on the Actions to Promote Financial Regulatory Reform* diterbitkan oleh AS, Ketua KTT G-20 di Pittsburgh– 25 September 2009. [↑](#footnote-ref-53)
53. Wawancara dengan Ketua Sherpa G-20 Indonesia tanggal 2 Juni 2010, dalam Laporan Tim Riset G20. *“Peran Indonesia Dalam G20: Latar Belakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia”*. Friedrich Ebert Stiftung., Jakarta. 2011. [↑](#footnote-ref-54)
54. Artikel Top, Nasiolisasi De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia, (<http://artikeltop.xyz/nasionalisasi-de-javasche-bank-menjadi-bank-indonesia.html>, diakses pada tanggal 8 Desember 2016). [↑](#footnote-ref-55)
55. Bank Indonesia, (<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 8 Desember 2016). [↑](#footnote-ref-56)
56. *Bank Indonesia,* (<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>, diakses pada 8 Desember 2016). [↑](#footnote-ref-57)
57. *Bank Indonesia*, (<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/Contents/Default.aspx>, diakses pada 8 Desember 2016). [↑](#footnote-ref-58)
58. *Bank Indonesia*, (<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/hubungan-kelembagaan/internasional/Contents/Default.aspx>, diakses pada 8 Desember 2016). [↑](#footnote-ref-59)
59. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (<http://www.kemenkeu.go.id/Page/sejarah>, diakses pada 12 Desember 2016). [↑](#footnote-ref-60)
60. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (<http://www.kemenkeu.go.id/Page/tugas-dan-fungsi>, diakses pada 12 Desember 2016). [↑](#footnote-ref-61)
61. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (<http://www.kemenkeu.go.id/node/107>, diakses pada 12 Desember 2016). [↑](#footnote-ref-62)